

BAB V1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memahami konflik antar aliran kelompok umat beragama amatlah sulit, termasuk konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura, jika tidak diletakkan dalam konteks terbentuknya konflik tersebut, sebab konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor dan tumpang tindih dengan beragam kepentingan sesuai dengan konteks yang mengitari kelompok beragama yang berkonflik tersebut. Dengan demikian, dari hasil penelitian terhadap konflik Sunni-Syi'ah Sampang Madura, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Desa Karang Gayam dan Blu'uran, Sampang Madura, disebabkan serangkaian wacana kebencian dan penyesatan yang terus dilakukan secara intens oleh para elite lokal (kyai), terhadap komunitas muslim Syi'ah yang dipimpin Kyai Tajul Muluk dan diperparah dengan konflik internal keluarga antara Tajul Muluk dengan adiknya, Roisul Hukuma yang disebabkan oleh faktor kecemburuan sosial dan asmara serta diperkeruh dengan fatwa sesat MUI se-Madura dan tingkat Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian keberadaan komunitas muslim Syi'ah semakin tidak memiliki tempat dan ruang gerak di Sampang Madura.

Kedua, akar permasalahan terjadinya konflik Sunni-Syi'ah menjadi konflik yang berkepanjangan dan menjadi sebuah tragedi bedarah satu orang

tewas dan puluhan lainnya luka-luka serta puluhan rumah ludes dibakar, disebabkan oleh persoalan akumulatif mulai dari perebutan otoritas tradisional, ekonomi dan politik. Banyaknya kepentingan yang disematkan terhadap isu Sunni-Syiah, eskalasi konflik semakin memanas dan berlarut-larut tidak kunjung selesai. Meledaknya konflik menjadi bara api pembakaran pada mulanya, karena kuatnya hubungan para potron (kyai) dalam menghegemoni dan mereproduksi massa, untuk melakukan tindakan kekerasan. Kekuatan patron dalam menjalin hubungan dengan kliennya, juga dimanfaatkan oleh pemerintah dan para elite politik, untuk menjaga politik elektoral, sehingga para pemangku kebijakan dan penegak hukum enggan untuk menunjukkan sikap yang tegas dalam menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mereka mengambil jalan aman dengan cara diam, mengikuti arus mayoritas.

Ketiga, konflik Sunni-Syi'ah Sampang dapat mengakibatkan dampak-dampak sosial yang merubah tatanan sosial-budaya yang sudah mapan baik dalam kehidupan beragama maupun dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Di samping itu pula, warga Syi'ah, harus menelan duka yang mendalam, satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka serta puluhan rumah milik mereka ludes dibakar. Mereka diusir dari kampung kelahirannya dan diungsikan ke Rusun Puspa Agro Sidoarjo. Mereka terpaksa harus menelan penderitaan dan kepedihan mendalam akibat konflik tersebut. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya terpasung, mata pencaharian terputus dan semakin menambah derita kemiskinan bagi mereka.

B. Saran

Konflik antara Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura, perlu dibaca secara utuh, dalam artian, ketika berbicara tentang konflik keagamaan di Madura, maka perlu melihat kondisi sosial-budaya dan keagamaan masyarakat Madura, termasuk di dalamnya persoalan kepemimpinan lokal keagamaan Madura. Hal ini sangat penting bagi para pengambil kebijakan dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Madura khususnya di Sampang, sehingga konflik keagamaan bisa diselesaikan dengan cara damai tanpa syarat dengan kekerasan.

Pemahaman yang utuh tentang Madura, pada akhirnya akan menciptakan pemahaman yang utuh pula dalam memahami persoalan konflik yang terjadi di Sampang Madura. Apakah konflik keagamaan, konflik internal keluarga, konflik otoritas politik lokal, ataukah konflik sosial lainnya?. Namun, pada dasarnya, konflik itu berawal dari syiar kebencian dan penyesatan yang dikumandangkan secara intensif oleh para elite lokal dan konflik internal keluarga. Jadi konflik itu merupakan persoalan akumulatif dari berbagai faktor, sehingga perlu bagi para pengambil kebijakan dalam menangani konflik Sunni-Syi'ah tersebut, untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

Pertama, perlu memahami karakteristik kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik lokal dan keagamaan masyarakat yang berkonflik.

Kedua, pemerintah dan para penegak hukum perlu bersikap objektif terhadap dua kelompok yang berkonflik, tanpa melihat posisi mayoritas dan

minoritasnya, serta menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Ketiga, perlu menciptakan kondisi dialogis dan hubungan sesama agama yang bersifat kondusif, dengan tidak hanya mengandalkan para tokoh agama atau intelektual, namun, diperlukan sikap kerjasama dan proaktif dari semua unsur elemen masyarakat, termasuk masyarakat yang berkonflik tersebut.

Keempat, diperlukan adanya kerjasama yang sehat, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan politik lokal, sehingga dapat menciptakan suasana keterbukaan dikalangan para elite lokal dan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, maka dapat menumbuhkan sikap toleran antar penganut aliran paham keagamaan yang berbeda, sehingga tidak terjadi prasangka dan kecurigaan, terutama dalam misi dan dakwah keagamaan.